

# **LAPORAN KINERJA (LKj)**

## **Tahun 2022**

### **DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

**Jl. Arif Rahman Hakim No. 40**

**No. Telp : 0741-62295**

**Faximile (0741) – 61545**

**Website : <https://kehutanan.jambiprov.go.id/>**

**Email : [dinas.kehutan2016@gmail.com](mailto:dinas.kehutan2016@gmail.com)**

**Kode Pos : 36124**

# Kata Pengantar



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 LKj Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jambi, 15 Januari 2022

Kepala Dinas  
Kehutanan Provinsi Jambi

AKHMAD BESTARI, SH.,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 197405081999031004

# Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerja persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya sebesar 0,2% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 0,25%.
2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator kinerja persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal sebesar 15% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 15,63%.
3. Sasaran meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan indikator kinerja persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,20% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 0,25%.
4. Sasaran meningkatnya pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator kinerja persentase Lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk sebesar 8,2% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 12,78%.

5. Sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi sebesar 1,46% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 1,76%.
6. Sasaran meningkatnya peningkatan kelembagaan pengendalian karhutla dengan indikator kinerja persentase penurunan laju deforestasi 0.83% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 1,51%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi



<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Fungsi dan Tugas .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis .....	4
1.4 Keadaan Pegawai .....	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	8
1.6 Keuangan .....	9
1.7 Sistematika LKj IP .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis .....	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	14
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan .....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	23
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	24
2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.....	24
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	25
2.4 Instrumen Pendukung.....	25

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
3.2.1. Sasaran 1 Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya .....	28
3.2.2. Sasaran 2 Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial .....	30
3.2.3. Sasaran 3 Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi .....	33
3.3. Realisasi Anggaran.....	37

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

# Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	8
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 .....	13
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 .....	16
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan 2021-2026 .....	21
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .....	21
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	23
Tabel 2.7 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022 .....	24
Tabel 2.8 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.....	25
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.1.1 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1 .....	29
Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja 2021-2026 Indikator 1.....	29
Tabel 3.1.3 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2 .....	31
Tabel 3.3.4 Capaian Kinerja 2021-2026 Indikator 2.....	32
Tabel 3.3.5 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 3 .....	33
Tabel 3.3.6 Capaian Kinerja 2021-2026 Indikator 3 .....	35
Tabel 3.8 Capaian Kinerja s.d Jangka Menengah Daerah.....	36
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	38
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	39

# Daftar Gambar



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .....	2
Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022.....	5
Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	6
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	7
Gambar 1.5 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	7
Gambar 1.7 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Luasan Pemulihan Dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya.....	30
Gambar 1.8 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui PS.....	32
Gambar 1.9 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi .....	35



# BAB 1

## Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

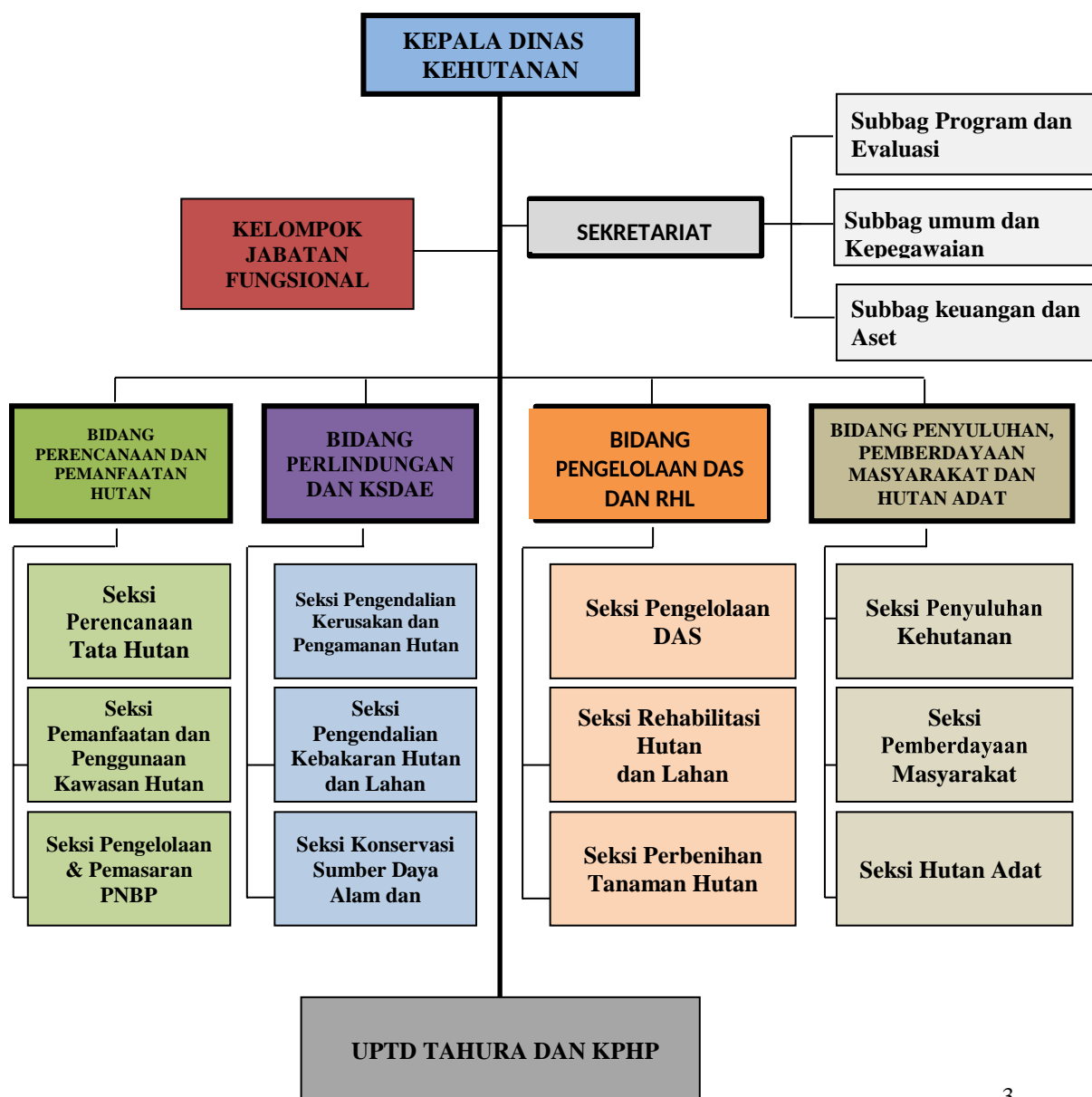
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi, tata kesatuan pengelolaan hutan, rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dikawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan); rehabilitasi diluar kawasan hutan negara; pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi Jambi seperti taman hutan kenali dan aset pemerintah provinsi Jambi lainnya; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 3) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;

- 5) Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 6) Pelaksanaan koordinasi Kehutanan dengan instansi terkait lainnya dibidang Kehutanan dan non bidang Kehutanan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan memantapkan kualitas SDM.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup seluruh lingkup Dinas Kehutanan. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah bagaimana kita melindungi hutan secara lestari.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Hutan di Provinsi Jambi sebagai paru-paru dunia yang berkontribusi menurunkan emisi karbon;
2. Laju tingkat kerusakan hutan akibat kebakaran dan okupasi (deforestasi) relative cukup tinggi;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan akses kelola melalui perizinan perhutanan social yang diberikan.

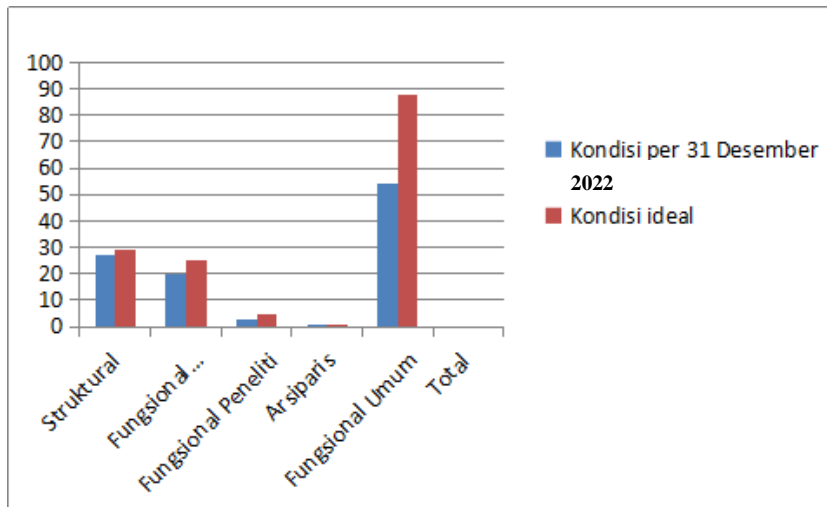
#### **1.4 Keadaan Pegawai**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Kehutanan) dan 11 UPTD KPHP dan 1 UPTD KPHP Tahura).

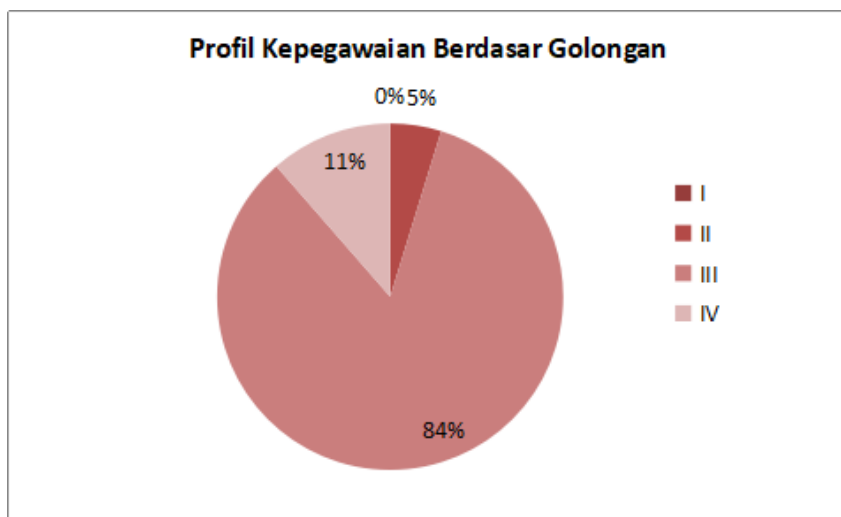
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022 , tercatat sebanyak 317 pegawai yang terdiri 67 pejabat struktural, 94 pejabat fungsional tertentu, dan 156 pejabat fungsional umum yang terbagi di Instansi Induk (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) sebanyak 317 pegawai yang terdiri dari 67 orang pejabat struktural, 94 pejabat fungsional tertentu (36 pejabat fungsional penyuluh kehutanan, 2 pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan dan 56 pejabat fungsional polisi kehutanan), dan 156 orang fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

**Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**



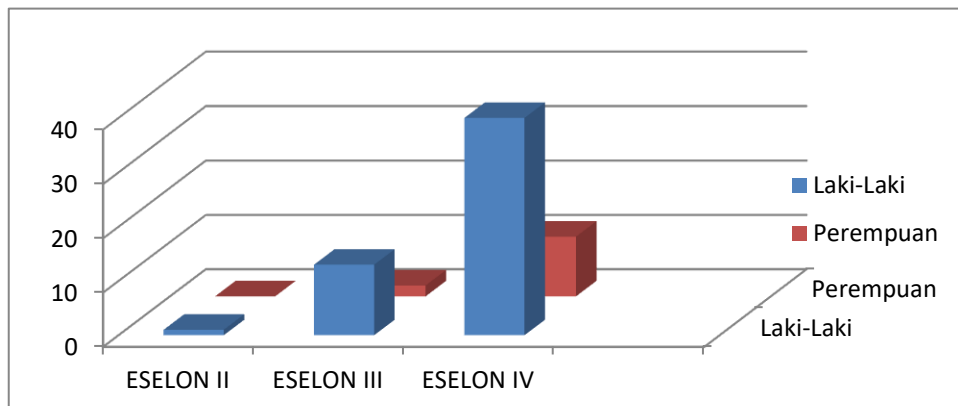
**Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Kehutanan sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

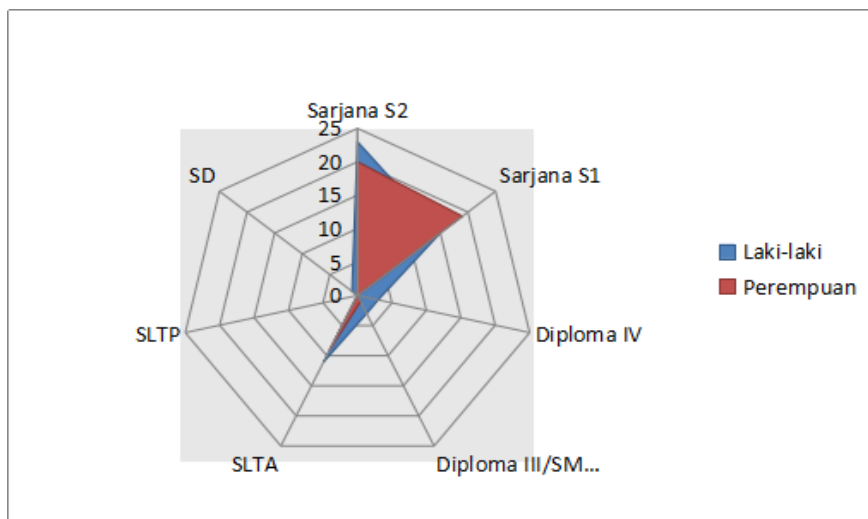
**Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang.

Profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1, hal ini terkait dengan jabatan fungsional tertentu dan umum yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

### **1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana**

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan/ Kondisi</b>
<b>1</b>	Alat-alat angkutan	130	Baik
<b>2</b>	Alat kantor dan rumah tangga	3.284	Baik
<b>3</b>	Alat studio dan alat komunikasi	268	Baik
<b>4</b>	Bangunan Gedung	214	Baik
<b>5</b>	Jaringan, saluran irigasi dan jembatan	178	Baik
<b>6</b>	Buku perpustakaan	400	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.



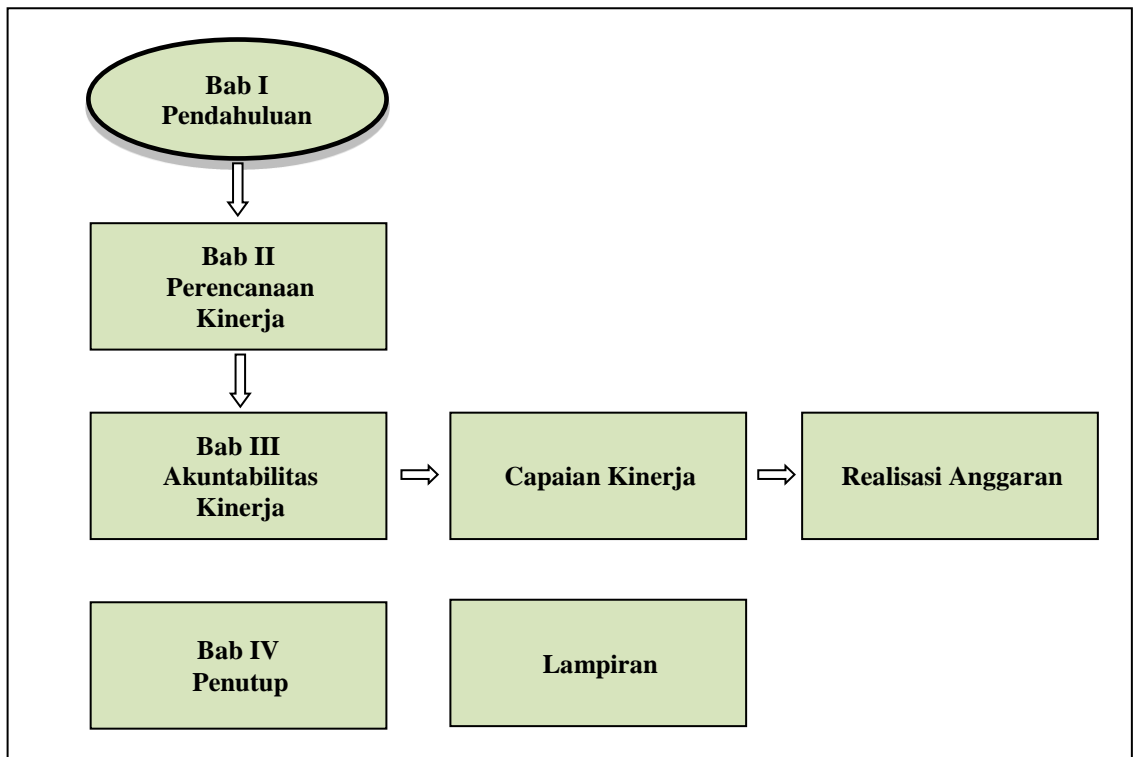
## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 75.451.123.108** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 45.779.618.877** dan belanja langsung sebesar **Rp. 29.671.504.231** yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar **Rp. 29.671.504.231** yang didukung oleh 5 program dan 17 kegiatan.

Selain Dana APBD, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 juga mengelola Dana APBN berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan total dana **Rp. 6.936.395.000,-**. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemulihan ekosistem gambut dengan cara mempertahankan kebasahan gambut, pemanfaatan gambut sesuai dengan daya dukungnya dan merevitalisasi ekonomi masyarakat yang berada dilahan gambut. Adapun kegiatan dikenal dengan slogan 3R yaitu Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Infrastruktur Pembahasan Gambut (Rewetting), Penanaman areal gambut yang rusak (Revegetasi) dan Peningkatan ekonomi kelompok masyarakat pada kawasan gambut baik yang terdampak maupun yang peduli (Revitalisasi Ekonomi).

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2022 menyajikan Pencapaian Kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj/manfaat LKj, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran

utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :  
2.1 Perencanaan  
Strategis  
2.2 Perjanjian Kinerja  
Tahun 2022  
2.3 Rencana  
Anggaran Tahun  
2022  
2.4 Instrumen  
Pendukung

### 2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022 , Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 , Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

### 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema* **“JAMBI MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) di Bawah Ridho ALLAH SWT”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek siap meningkatkan pelayanan publik secara professional dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Memantapkan tata Kelola pemerintahan
2. Memantapkan perekonomian masyarakat
3. Memantapkan kualitas SDM

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026**

Visi : “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Ridho ALLAH SWT”			
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan	Peningkatan perlindungan pengelolaan Kawasan konservasi dan Kawasan resapan air	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya
			Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal
			Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan daerah

	(ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	wilayah barat	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk
			Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi
			Persentase penurunan laju deforestasi

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3. Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

**“ Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan”**

### 2.1.3 Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2020	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	

										(2026)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan hayati dan ekosistemnya	%	80%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	81%
2	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	%	8%	15%	20%	26%	38%	44%	44%
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor Kehutan an dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah	%	0,20 %	0,20%	0,20 %	0,20%	0,20 %	0,20%	0,20%
4	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase Lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	%	4,5%	8,2%	12%	15,78 %	19,54 %	23,30 %	23,30%
5	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	%	1,3%	1,46%	1,58 %	1,71%	1,85 %	1,99%	1,99%

		melalui rehabilitasi								
6	Peningkatan kelembagaan pengendalian karhutla	Persentase penurunan laju deforestasi	%	1,57 %	0,83%	0,83 %	0,83%	0,83 %	0,83%	0,83%

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Peningkatan perlindungan pengelolaan Kawasan konservasi dan Kawasan resapan air wilayah barat	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam provinsi.</li> <li>2. Melakukan monitoring pengawasan dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas masyarakat disekitar kawasan ekosistem esensial.</li> <li>4. Meningkatkan pengelolaan kawasan daerah penyangga.</li> <li>5. Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA.</li> <li>6. Penguatan kapasitas dan Pemberdayaan masyarakat di sekitar TAHURA provinsi.</li> </ol>



		Meningkatnya luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan</li> <li>2. Meningkatkan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan</li> <li>3. Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial</li> </ol>
2	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan DAS</li> <li>2. Mengoptimalkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS</li> <li>3. Menerapkan teknis konservasi tanah dan air di wilayah DAS</li> <li>4. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS</li> <li>5. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan DAS</li> <li>6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS</li> </ol>
		Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemanfaatan hutan di KPH</li> <li>2. Melakukan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)</li> <li>3. Melaksanakan pembangunan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan Negara</li> <li>4. Melaksanakan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan</li> <li>5. Melakukan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan</li> <li>6. Melaksanakan pembangunan hutan rakyat diluar kawasan hutan Negara</li> <li>7. Melakukan penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dana tau</li> </ol>

			bibit terdaftar 8. Melaksanakan sertifikasi sumber benih 9. Melaksanakan sertifikasi mutu benih 10. Melaksanakan sertifikasi mutu bibit 11. Melaksanakan pengawasan peredaran benih dan/atau
3	Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla	Menurunnya tingkat kerusakan kawasan hutan/laju deforestasi	1. Menyusun rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Melaksanakan pembagian blok/petak pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 3. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional KPH 4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan 5. Menyusun rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 6. Menyediakan data dan informasi wilayah usaha dikawasan produksi 7. Menyediakan data dan informasi wilayah usaha di kawasan lindung 8. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi 9. Melaksanakan penilaian rencana pengelolaan dikawasan hutan produksi 10. Melaksanakan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan 11. Melaksanakan koordinasi

			<p>dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung</p> <p>12. Melakukan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan</p> <p>13. Melakukan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan</p> <p>14. Melakukan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan</p> <p>15. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</p> <p>16. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan</p> <p>17. Melakukan pengawasan perizinan pengelolaan hasil hutan bukan kayu</p> <p>18. Melaksanakan pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati</p> <p>19. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>20. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>21. Melakukan rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/tahun</p>
--	--	--	---

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan 2021-2026

**Tabel 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN 2021-2026**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan				
	1) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	1) Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	$= \frac{DBH\ SDA + DBH\ DR + Retribusi\ Hutan\ Kenali}{Pendapatan\ Daerah} \times 100$	Bidang PPH	
	2) Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	2) Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	$= \frac{Luas\ Hutan\ yang\ dikelola\ setiap\ tahun}{Luas\ 415\ Izin\ (204,296,97\ Ha)} \times 100$	Bidang PPMHA	
	3) Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	3) Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	$= \frac{Luas\ Lahan\ Kritis\ yang\ diRehabilitasi}{Total\ Luas\ Lahan\ Kritis\ (181.888\ Ha)} \times 100$	Bidang PKSDAE	

**Tabel 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama Dalam Mendukung Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Satuan Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2026)
					2022		2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan				Target	Capaian					
1.	1) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	%	0,2%	0,2%	0,25%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
2.	2) Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	%	8%	15%	15,63%	20%	26%	38%	44%	44%
3.	3) Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	%	1,3%	1,46%	1,69%	1,58%	1,71%	1,85%	1,99%	1,99%

berdasarkan dari table IKU telah didapat dokumen IKU yang telah diformulasikan, sehingga pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi serta IKU sepenuhnya bisa dimanfaatkan baik dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran, hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat individu dan setingkat eselon IV keatas. Selain itu pengumpulan data kinerja bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam hal kebijakan nasional, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni kebijakan nasional untuk rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menuju hutan lestari dan membuka ruang untuk pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Selain kebijakan tersebut pemerintah pusat juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) bekerjasama dengan TNI dan POLRI. Dalam penanggulangan kasus kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Untuk luas persetujuan Perhutanan Sosial merupakan indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dijabarkan sesuai dengan kewenangan daerah adalah fasilitasi untuk usulan persetujuan Perhutanan Sosial dan optimalisasi pemanfaatan Perhutanan Sosial oleh kelompok masyarakat penerima. Capaian IKU terkait persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal untuk target Tahun 2022 sebesar 15% tercapai 15,63%.

Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Adapun target persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi Tahun 2022 sebesar 1,46% tercapai 1,69%.

Kontribusi sektor Kehutanan dari bagi hasil dan retribusi diperoleh dari PNBP PSDH dan Retribusi Hutan Pinus Kenali Pal XI, upaya peningkatan penerimaan daerah tersebut dilaksanakan melalui pengawasan berkala terhadap PBPH dan Rekonsiliasi

hasil pemenuhan kewajibannya, dari target persentase kontribusi sektor Kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah 0,2% tercapai 0,25.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor Kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah	0,2%
2.	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin perhutanan social yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	15%
3.	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi	1,46%
4.	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	8,2%

5.	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0,2%
6.	Peningkatan kelembagaan pengendalian Karhutla	Persentase penurunan laju Deforestasi	0,83%

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

## 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 82.824.955.278,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 53.959.587.467,-** dan Belanja Langsung **Rp. 28.865.367.811,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi sebesar **Rp. 75.451.123.108,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 45.779.618.877,-** dan Belanja Langsung **Rp. 29.671.504.231,-**.

### 2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 75.451.123.108,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 45.779.618.877,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 29.671.504.231,-.

**Tabel 2.7 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Tidak Langsung Non Keistimewaan	-	-
2	Belanja Tidak Langsung Keistimewaan	Rp. 45.779.618.877	94,37%
3	Belanja Langsung Non Keistimewaan	Rp. 29.671.504.231	77,96%
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 75.451.123.108</b>	<b>87,92%</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jambi., 2022



### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	Rp. 989.077.160	93,01%	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Rp. 6.311.845.680	63,37%	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Rp. 15.709.323.920	73,86%	Program Pengelolaan Hutan
	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi			
	Peningkatan kelembagaan pengendalian karhutla			
4.	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Rp. 79.884.800	91,59%	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

### 2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 , digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses

pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

## BAB 3

### Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :  
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022  
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
3.3 Realisasi Anggaran

#### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah	%	0,2%	0,25%	80%	Hijau Muda
2.	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	%	15%	15,63%	95,9%	Hijau Tua
3.	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	%	1,46%	1,71%	85,3%	Hijau Muda

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai  $\geq 87\%$** ) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 80 sampai 90%, atau melampaui dari target yang ditetapkan.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022 , capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Kehutanan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 80%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On Internasional Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0,2%	0,54%	0,27%
		Jumlah Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	25 Ha	25 Ha	98,64%
		Jumlah Pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA	1 Laporan	1 Laporan	96,78%
		Jumlah Perencanaan pengelolaan TAHURA	1 Laporan	1 Laporan	75,46%

Realisasi pada sasaran meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya tidak terlaksana dikarenakan Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (Efisiensi).

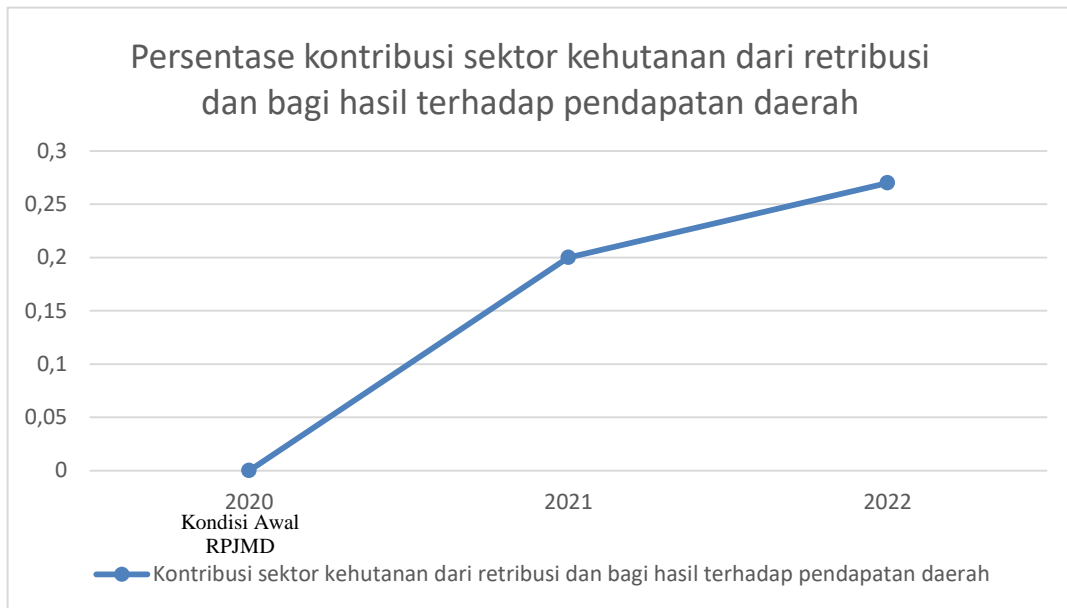
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	80% (kondisi kinerja awal RPJMD 81.449 Ha)	0,2 %	0,2%	0,54%	0,27%

Pada capaian Tahun 2020 mengikuti Renstra lama dimana nomenklatur pada Kemendagri Nomor 50 Tahun 2020 berbeda indikatornya pada Renstra 2021.

Gambar 1.7 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya.



Sasaran #2: Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator kinerjanya yakni persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)
- Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan (Dinas Kehutanan)

- Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)
- Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)
- Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)
- Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (Dinas Kehutanan)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)
- Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
2.	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan	persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat	15%	15,63%	95,9%

	Sosial	secara optimal			
		Jumlah peningkatan dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	100%	95,60%	100%
		Jumlah penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	100%	32%	68%
		Jumlah penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	100%	92,38%	95%

Realisasi pada sasaran Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal untuk kegiatan Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan tidak terlaksana dikarenakan pembangunan fisik rumah getah jelutung tidak mencantumkan konsultan pengawas dan konsultan perencanaan.

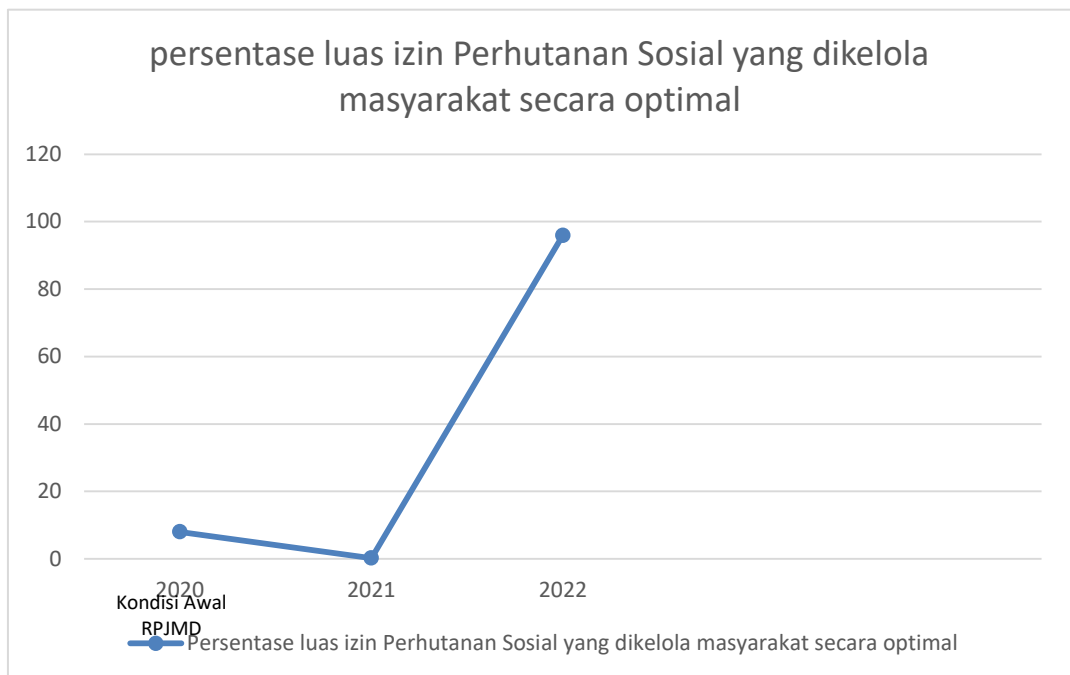
Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
2.	persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	8% (15.783,55 Ha dari total luas izin 204.296,97 Ha)	0,2 %	15%	15,63%	95,9%

Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 95,9% dari target yang ditetapkan karena terjadi luas penanaman lahan kritis.

Gambar 1.8 Grafik Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.





Sasaran #3 Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator kinerjanya yakni Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
2. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
3.	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis melalui	1,46%	1,71%	1,69%

		rehabilitasi			
		Jumlah pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPH	177 Ha	92 Ha	74,90%
		Jumlah pelaksanaan pemanfaatan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	186 Ha	186 Ha	71,15%
		Jumlah pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	25 Ha	25 Ha	100%
		Jumlah pelaksanaan pemanfaatn hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	42,5 Ha	42,5 Ha	80,78%
		Jumlah pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	25 Ha	25 Ha	100%
		Jumlah pelaksanaan pemanfaatan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	129 Ha	129 Ha	82,07%
		Jumlah perencanaan pengelolaan Tahura	25 Ha	25 Ha	76,03%

Rendahnya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi

dikarenakan Pengadaan bibit pinang yang seharusnya belanja bahan/bibit tanaman pada aplikasi SIPD dikelompokkan pada belanja modal.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	0,28%	1,39%	1,46%	1,69%	115,75%

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,69% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan.

**Gambar 1.9 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi**



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah**

No.	Indikator	Awal RPJMD 2020	Capaian (%)			Target s/d 2022 (%)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			2020	2021	2022		
1.	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah	0,2%	1,16%	0,68%	0,25%	0,2%	125%
2.	Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	8% (15.783,5 5 Ha dari total luas izin 204.296,9 7 Ha)		13%	15,63%	15% (penambahan 14.287 Ha menjadi 30.070,55)	104,2%
3.	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,3%	0,28%	0,11%	1,69%	1,46%	115,7%

1. Capaian kinerja kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah dibandingkan target tahun 2022 sebesar 0,2% tercapai 125%, artinya capaian Dinas Kehutanan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi.
2. Capaian kinerja luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal dibandingkan target tahun 2022 sebesar 15% tercapai 104,2%, artinya capaian Dinas Kehutanan melebihi target yang telah ditetapkan, karena terjadi luas penanaman lahan kritis.
3. Capaian kinerja penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dibandingkan target tahun 2022 sebesar 1,46% tercapai 115,7% artinya Dinas Kehutanan telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini hasil dari upaya Dinas Kehutanan dalam memberdayakan masyarakat serta mengefektifkan penanaman dari kompensasi pinjam pakai IUPKH.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi-Instansi vertikal lainnya).
- b. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNBPD PSDH dan Dana Reboisasi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Minimnya anggaran yang disediakan
- b. Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- c. Kurangnya sarana dan prasarana

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 23.131.069.459,- (77,96%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 29.671.504.231,-. Realisasi anggaran untuk program atau kegiatan utama sebesar Rp. 75.451.123.108,- (87,92%), sedangkan realisasi untuk program atau kegiatan pendukung (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 6.806.300.430,- (98,12%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp. 43.202.923.637 (94,37%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp. 23.131.069.459,- (77,96%);
3. Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 6.806.300.430,- ( 98,12%) .

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp 23.131.069.459 (77,96%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 29.671.504.231,-
2. Realisasi anggaran program pendukung Tugas Pembantuan sebesar Rp. 6.806.300.430,- (98,12%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 6.936.395.000,-

3. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 43.202.923.637,-(94,37%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 45.779.618.877,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0,2%	0,25%	0,54%	Rp. 989.077.160,-	Rp. 914.291.013,-	92,43%
2	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	15%	15,63%	95,9%	Rp. 6.311.845.680	Rp.4.451.689.591,-	70,52%
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,46%	1,71%	1,69%	Rp. 15.709.323.920	Rp.6.843.725.400,-	43,56%
Belanja langsung pendukung						6.936.395.000,-	6.806.300.430,-	98,12%

Belanja tidak langsung					45.779.618.877,-	43.202.923.637,-	94,37%
<b>Jumlah belanja langsung</b>					29.671.504.231,-	23.131.069.459,-	77,96%
<b>Total Belanja</b>					75.451.123.108,-	66.333.993.096,-	87,92%

Sumber : Dinas Kehutanan, 2022

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Analisis efisiensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	95,34	92,43	97,29 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	78,35	70,52	90%
3.	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	48,95	43,56	88,98 %

Sumber : Dinas Kehutanan, 2022

#### Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 92,09%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi penggunaan alokasi anggaran dalam memenuhi capaian kinerja.

# BAB 4

## Penutup

Bab 4 berisi :  
*Kesimpulan*  
*Rencana*  
*Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kehutanan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “ **Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan**” dengan indikator persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya mencapai 95,34% dan Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal sebesar 78,35% sementara Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi mencapai 48,95%.
2. Realisasi kinerja Dinas Kehutanan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 87,92%, dengan efisiensi anggaran sebesar 92,09%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti harga/bibit tanaman yang terjadi inflasi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
2. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.